

## AGAMA DAN NEGARA DALAM KONFLIK ANTAR AGAMA

Yosep Laritmas<sup>1</sup>, Methodius Junistin Ambala Henakin<sup>2</sup>, Julio Pius Zoraida Dopo<sup>3</sup>, Placidus Wilemos Soiandro Kalfinus<sup>4</sup>, Thomas Mikael Tani<sup>5</sup>, Yoseph Freinademetz Hali Keban<sup>6</sup>, Yakobus Paulus Feromande Durye<sup>7</sup>

[joseplaritmas@gmail.com](mailto:joseplaritmas@gmail.com)<sup>1</sup>, [tatajastyn@gmail.com](mailto:tatajastyn@gmail.com)<sup>2</sup>, [dopojulio8@gmail.com](mailto:dopojulio8@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[androkalfinus@gmail.com](mailto:androkalfinus@gmail.com)<sup>4</sup>, [tomitani250702@gmail.com](mailto:tomitani250702@gmail.com)<sup>5</sup>, [freinademetzk@gmail.com](mailto:freinademetzk@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[yoppidurye@gmail.com](mailto:yoppidurye@gmail.com)<sup>7</sup>

Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero

### Abstrak

Agama dan negara adalah dua topik yang selalu dianggap kontekstual untuk ditelaah secara luas dan mendalam. Sejarah telah mencatat dengan jelas bahwa perbedaan nilai, pandangan, dan agama telah mendorong lahirnya perang antar negara, konflik antar kelompok masyarakat, dan masih banyak lagi. Hal yang sama telah dan tengah dihadapi oleh Negara Indonesia, konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama kerap kali mewarnai berita-berita nasional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor pendorong lahirnya pemikiran serta pandangan intoleransi antar anggota masyarakat dan negara. Berhadapan dengan situasi demikian, perlu adanya kesadaran untuk menggali kembali nilai tradisi, karena tradisi selalu mendorong terciptanya kesatuan serta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Di lain sisi, pendidikan berperan dalam pembentukan pemikiran kritis di kalangan anggota masyarakat. Dengan demikian, pandangan intoleransi dan konflik yang dilatarbelakangi oleh agama dapat dicegah.

**Kata Kunci:** Agama, Negara, Intoleransi, Tradisi, Pendidikan.

### PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh setiap orang semenjak ia berada di dalam kandungan. Hak ini membuat seorang menjadi pribadi yang unik dan berbeda dengan pribadi yang lainnya. Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa dan tidak seorang pun memiliki hak untuk meniadakan atau pun melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh pribadi yang lain. Negara Indonesia yang adalah negara hukum telah menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dihormati oleh negara.<sup>1</sup>

Kesadaran akan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan produk pemikiran khas yang lahir pada akhir abad ke-20 pasca perang dunia kedua. Perang dunia kedua telah korban jiwa dan juga materi. Negara yang menang atau pun negara yang kalah menghadapi permasalahan yang sama, yakni masalah kemanusiaan. Akhir dari perang dunia dua membawa kesadaran baru akan pentingnya penghormatan kepada hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya.

Sebagai tindakan konkret dari kesadaran ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga universal mulai membahas gagasan hak asasi manusia yang bersifat universal yang tidak memandang ras, agama, suku, latar belakang, bangsa, kebebasan berpikir, dan berpendapat, dan hak-hak lainnya. Aspek-aspek ini lah yang mendorong terbentuknya *The Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Deklarasi ini menandai lahirnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi

<sup>1</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," dalam Tim Permata Press, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)* (Surabaya: Permata Press, 2012), hlm. 1-2.

manusia yang dimiliki oleh setiap orang dan harus dilindungi oleh negara.<sup>2</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Agama dan Konflik Antar Kelompok Masyarakat di Indonesia

Konflik antar kelompok masyarakat (antar agama) yang terjadi saat ini, pada umumnya didasari pada kebencian terhadap perbedaan. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap nilai HAM yang berkorelasi pada rendahnya pendidikan di Indonesia. Agama kerap kali digunakan oleh sekelompok orang untuk memanipulasi kelompok lain yang lebih rentan untuk guna menyerang kelompok lainnya dan menimbulkan kekacauan.<sup>3</sup>

Konflik agama yang di Indonesia terjadi selama ini telah menimbulkan rasa benci antar kelompok yang mendalam. Kelompok-kelompok agama tertentu dapat membenarkan suatu tindakan kekerasan dengan mendasarkannya pada doktrin serta ajaran tertentu. Penanaman nilai-nilai yang keliru di dalam kelompok-kelompok tertentu ini dapat mendorong terjadinya kekerasan dan permasalahan sosial.<sup>4</sup>

Sejauh ini terdapat dua kelompok intoleransi agama di Indonesia. Kelompok pertama adalah intoleransi pasif, pada umumnya kelompok ini akan mengambil sikap pasif dan tidak peduli terhadap keberadaan kelompok agama lainnya. Kelompok kedua adalah kelompok intoleransi aktif. Kelompok ini cenderung untuk melakukan tindakan yang mengarah pada kekerasan (psikis dan fisik), ketika berhadapan dengan kelompok agama lainnya.<sup>5</sup>

Konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama semakin sulit dibendung akibat dari kemajuan teknologi yang mendorong lahirnya internet dan media sosial. Kehadiran internet secara perlahan telah menggeser peran budaya di tengah masyarakat. Norma yang pada awalnya bertujuan untuk menjadi pandangan hidup dan menciptakan ketertiban di tengah masyarakat, saat ini dianggap kolot dan tidak lagi relevan.<sup>6</sup> Masyarakat secara perlahan tercabut dari akar kebudayaannya.

Permasalahan sosial yang dilatarbelakangi oleh agama pada umumnya tidak terlepas dari sikap kritis para penganut agama tertentu. Rendahnya sikap kritis para penganut agama tertentu ini, tidak lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan para penganut agama tertentu tidak memahami suatu permasalahan secara utuh dan sangat mudah bagi kelompok tertentu untuk memanipulasi dan memanfaatkan ketidaktahuan dan ketidakberdayaan kelompok ini.

Berhadapan dengan situasi dewasa ini penting untuk melihat kembali sejauh mana hubungan dan agama dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan memiliki satu kesamaan yang tidak dapat dipisahkan, yakni membentuk pandangan hidup dan menjadi kompas moral dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi sangat penting, karena pada saat ini masyarakat pada umumnya adalah masyarakat multikultural.

### Hubungan Agama dan Kebudayaan

Pertanyaan mengenai agama telah menjadi pertanyaan abadi bagi umat manusia. Banyak orang mencari jawaban yang bisa memenuhi keingintahuan umat manusia. Akan tetapi, pertanyaan tentang “Apa itu agama” bukanlah suatu masalah yang memerlukan solusi, melainkan misteri yang tidak dapat dipahami. Menurut KBBI, agama adalah suatu ajaran, sistem yang membina tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan

---

<sup>2</sup> Asher Tumbo, “Konsep *Transitional Justice* dalam Penanganan Pelanggaran HAK ASASI MANUSIA Berat di Indonesia”, *Paulus Law Journal*, 1:2 (Makassar, Maret 2020), hlm. 73.

<sup>3</sup> Otto Gusti Madung, *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Mauere: Penerbit Ledalero, 2014), hlm. 78.

<sup>4</sup> Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi, dan Demokrasi* (Mauere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 5.

<sup>5</sup> Robertus Mirsel et al., “Peranan Modal Sosial dalam Pencegahan dan Penanganan Masalah Intoleransi di Nusa Tenggara Timur” *Jurnal Ledalero*, 22:1 (2023), hlm. 59.

<sup>6</sup> Soerjanto Poespowardojo, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 140.

Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.<sup>7</sup> Di lain sisi, kata “Agama” dalam Bahasa Indonesia diambil dari kata Sanskerta “a” artinya tidak dan “gama” artinya berantakan. Dengan demikian, agama tidak hanya dapat diartikan sebagai suatu aliran kepercayaan tertentu semata. Akan tetapi, agama dapat dipahami sebagai jalan yang dapat digunakan dalam menciptakan keteraturan melalui ajaran; nilai; dan pandangan hidup.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan apabila agama kerap kali diasumsikan sebagai kompas moral dan landasan hidup bermasyarakat serta bernegara.

Di Indonesia agama kerap kali melebur dan menjadi bagian dari kebudayaan setempat. Setiap individu dalam suatu masyarakat akan dibentuk oleh norma, budaya, dan ajaran agama pada waktu yang sama. Di lain sisi, sejarah telah mencatat dengan jelas bahwa agama tradisional telah ada sebelum agama besar lainnya masuk ke Indonesia (Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dll). Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kebudayaan yang masih mengakui keberadaan dan peran dari roh leluhur dalam kehidupan sosial masyarakat. Beberapa masyarakat tradisional dalam kebudayaan tertentu percaya bahwa malapetaka yang terjadi disebabkan oleh kelalaian dalam memenuhi kewajiban pada roh-roh leluhur.<sup>9</sup>

Di dalam setiap kebudayaan “Norma” menjadi salah satu elemen dasar yang tidak dapat dilepas-pisahkan dari kebudayaan. Norma dapat dipahami sebagai aturan tradisional yang mengatur kehidupan semua orang. Aturan ini tidak tertulis, tetapi diajarkan dan diwariskan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Kehadiran norma dalam kebudayaan bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keamanan dalam kehidupan sosial suatu masyarakat.<sup>10</sup>

Keberadaan norma dalam suatu kebudayaan merupakan hal yang sangat penting, karena hanya melalui keteraturan manusia dapat mempertahankan serta meningkatkan esensi dan eksistensi diri sebagai seorang manusia. Akan tetapi, kebudayaan dan norma yang terkandung di dalamnya hanya bersifat teritorial atau hanya berlaku pada kelompok dan daerah tertentu semata.

Berhadapan dengan permasalahan ini, maka dibuatlah aturan umum yang harus ditaati dan diikuti oleh seluruh warga masyarakat dan negara tanpa terkecuali yang kemudian dikenal sebagai hukum. Hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan serta menjamin agar adanya kesempatan yang sama bagi semua orang dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan esensi serta eksistensinya sebagai seorang manusia seutuhnya.<sup>11</sup> Kehadiran hukum di dalam masyarakat merupakan bagian dari upaya negara untuk menjaga keamanan dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Hal ini hanya akan dapat tercapai apabila hak paling dasar dari setiap manusia diakui dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Hak ini yang dimaksud adalah hak asasi manusia (HAM) yang akan dibahas pada bagian berikut.

### **Hak Asasi Manusia (HAM) dan Agama**

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh seorang manusia yang bersifat universal dan tidak dapat diambil oleh siapa pun termasuk negara. Setiap individu wajib untuk mengakui dan menghormati hak asasi yang dimiliki oleh individu lainnya. Terdapat tiga hak utama di dalam hak asasi manusia, yakni hak ekonomi,

---

<sup>7</sup> KBBI, “Pengertian Agama” dalam KBBI Online, <https://kbbi.web.id/agama>, diakses pada 28 Januari 2026.

<sup>8</sup> Rika Syntia et al., “Pendidikan Sosiologi dari Sudut Pandang Agama” *Journal Islamic Education*, 1:4 (2023), hlm. 459.

<sup>9</sup> Jared Diamond, *The World Until Yesterday (Dunia Hingga kemarin)*, terj. Damaring Tyas Wulandari Palar (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 411-422.

<sup>10</sup> Joseph Raz, “Hakikat Hak-Hak” dalam Frans Ceunfin (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, terj. Yosef Maria Florisan (Maumere, 2008), hlm. 166-168.

<sup>11</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 59-60.

<sup>10</sup> Frans Ceunfin, *op. cit.*, hlm. xviii.

hak sosial dan hak budaya.<sup>12</sup>

Berdasarkan sejarah, Hak Asasi Manusia diterima pertama kali pada tanggal 10 Desember 1948. Kesadaran akan pentingnya pengakuan dan penegakkan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya dilandasi oleh liberalisme dan sosialisme tetapi, pengalaman penindasan selama bertahun-tahun. Pengalaman akan penindasan dan penderitaan yang timbul dari penjajahan tersebut melahirkan kesadaran akan pentingnya kebebasan dan kemerdekaan.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, HAM merupakan hak mutlak yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap individu, sehingga masyarakat dan negara memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa terkecuali.

Di lain sisi, ada dua hak yang lebih banyak diperhatikan sejak era Renaissance yaitu, hak untuk mengikuti hati nurani dan kebebasan beragama. Hati nurani menjadikan manusia istimewa dan membuat manusia berbeda dengan hewan. Dengan nurani manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang legal atau ilegal untuk dilakukan. Itulah mengapa dalam banyak kasus ketika seekor hewan menyerang manusia atau menghancurkan sesuatu, pemiliknya harus bertanggung jawab. Hewan hidup dengan instingnya dan manusia dengan akal budinya, artinya hanya manusia yang bisa bertanggung jawab, karena itulah manusia memiliki kebebasan.<sup>14</sup> Manusia dapat dengan bebas menggunakan kebebasannya untuk menjaga sesuatu yang terjadi di sekitarnya, ia dapat menganggapnya sebagai tanggungjawab atau tidak, tetapi hati nurani membawa manusia pada rasa bersalah, karena ia dapat melakukan sesuatu dengan benar, tetapi arahan hati nurani tersebut diabaikan.<sup>15</sup>

Di lain sisi, negara tidak bisa memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang melanggar hati nuraninya. Sebagai contoh untuk beberapa orang membunuh orang lain merupakan tindakan yang salah, negara tidak dapat memaksa mereka untuk membunuh orang lain bahkan atas nama negaranya. Setiap orang harus menghormatinya sebagai hak asasi manusia. Namun, kita harus tahu bahwa dalam beberapa kasus negara dapat melakukan intervensi ketika ada kewajiban dari negara seperti, membayar pajak atau negara menindak seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan kriminal di tengah masyarakat. Negara bertanggungjawab untuk menjamin keselamatan masyarakat meskipun akan melanggar hak asasi manusia.<sup>16</sup> Hal penting yang harus disadari setiap orang adalah kebebasan itu terbatas. Ada norma, hukum, dan orang lain yang memiliki kebebasan yang sama seperti kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti keinginan kita yang berlawanan dengan hati nuraninya. Setiap orang harus menghormati satu sama lain untuk menciptakan keamanan dalam masyarakat.

Kebebasan hati nurani merupakan bagian dari hak kebebasan berpikir. Setiap hukum di semua negara terbatas pada manusia. Setiap individu, memiliki martabat yang sama. Oleh sebab itu, memandang rendah pemikiran dan keyakinan yang lainnya merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Perbedaan dalam suatu pandangan harus disikapi dengan semestinya, sebab setiap individu memiliki pemahaman dan sudut pandang yang berbeda.<sup>17</sup> Sikap hormat terhadap perbedaan merupakan hal yang utama dalam masyarakat multikultural dewasa ini. Sejarah telah mencatat dengan jelas bahwa perbedaan pandangan dan keyakinan telah mendorong terjadinya perang yang menjadi sejarah kelam dari agama itu sendiri. Hal ini yang kemudian mendorong lahirnya semangat sekularisme di negara-negara Eropa pada umumnya.

---

<sup>11</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, op. cit.*, hlm. 189-194.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 189-194.

<sup>15</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), hlm. 71-72.

<sup>16</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, op. cit.*, hlm. 181-183.

<sup>17</sup> Otto Gusti Madung, *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia, op.cit.*, hlm. 123-127.

## Sekularisme Agama dan Negara

Max Weber (1864-1920) salah seorang sosiolog terkenal pada waktu itu menegaskan bahwa sekularisme merupakan ciri khas Bangsa Eropa. Ia sendiri menegaskan ada empat aspek yang melatar belakangi terjadinya sekularisme. Pertama, bertambahnya dominasi hukum positif dalam penataan politik atau pengaruh agama di dalam ruang publik semakin berkurang. Kedua, berkembangnya rasionalitas sebagai dampak rasionalitas instrumental yang bersifat efisiensi. Ketiga, adanya proses kehilangan daya gaib dunia yang mistis magis. Keempat, terjadinya proses personalisasi atau individualisasi mengenai keselamatan. Salah satu contoh yang dapat digunakan Calvinisme. Inti ajaran Calvinisme mengenai keselamatan telah mendorong lahirnya individualisme dan kapitalisme. Pengaruh ini terus berkembang dan pada akhirnya membentuk suatu negara kapitalis.<sup>18</sup>

Kehadiran semangat kapitalis yang bertentangan dengan agama telah melahirkan suatu sikap penolakan terhadap agama. Agama tidak lagi dianggap relevan di dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, relasi yang terjalin antar warga negara dibangun di atas rasionalitas instrumental. Di lain sisi, kehadiran agama dianggap sebagai hal yang irasional sehingga agama didesak ke dalam ruang privat. Di dalam ruang privat agama hanya berperan untuk mengatur kultus-kultus dan moral para penganutnya tanpa memiliki pengaruh di dalam ruang publik.<sup>19</sup> Ketika agama dikurung di dalam ruang privat, maka penindasan HAM kelompok minoritas dapat dilegalkan dengan dalil demi kepentingan masyarakat yang lebih luas (pandangan ini kemudian dikenal dengan utilitarianisme).<sup>20</sup> Ketidakhadiran agama sebagai kompas dan pertimbangan moral dapat membuka ruang bagi terciptanya kebijakan yang justru lebih berpihak kepada kelompok mayoritas (kelompok agama dominan) dan mengabaikan kepentingan kelompok minoritas (kelompok agama submisif).

Habermas dalam suatu kesempatan mengkritik pandangan Weber. Ia menegaskan bahwa terdapat dua kekeliruan dalam pemikiran Weber. Pertama, dalam sejarah perkembangan manusia agama akan disingkirkan oleh pengetahuan dan ideologi kemajuan. Pemikiran Weber ini kerap kali menjadi rujukan guna memahami perilaku masyarakat moderen. Kedua, ada semangat untuk membuat modernitas dan sekularisasi sebagai musuh agama. Pemikiran Habermas ini dapat dipahami karena sekularisasi kerap kali melahirkan masalah-masalah sosial dan moral. Pemikiran ini lah yang melatarbelakangi permasalahan agama di Indonesia. Ada banyak kelompok yang melakukan tindakan kekerasan atas nama agama. Mereka berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama yang konstitusinya didasarkan pada agama tertentu.<sup>21</sup>

Meminjam pemikiran Kant, ia membedakan dua sikap moral yakni, sikap moral heteromon dan sikap moral otonom. Sikap moral heteromon adalah suatu kesadaran yang dipaksakan kepada seseorang. Hal ini menandakan bahwa nilai-nilai moral belum terintegrasi sepenuhnya dalam diri seseorang. Ia menjalankan kesadaran yang dipaksakan dan pada akhirnya akan berujung pada kemunafikan. Hal ini jelas merendahkan martabat manusia yang memiliki akal budi. Seseorang dapat mempelajari nilai-nilai moral secara normatif dan bukan karena dibayangi oleh ketakutan akan hukuman. Moral otonom adalah

---

<sup>18</sup> Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi, dan Demokrasi op.cit.*, hlm. 33.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Utilitarianisme merupakan pandangan yang digagas oleh Jeremy Bentham. Bentham mendasari pemikirannya pada paham etis etika. Tindakan yang menguntungkan orang banyak merupakan suatu tindakan baik, sedangkan tindakan yang merugikan orang banyak dikategorikan sebagai tindakan yang buruk. Bentham kemudian dikenal dengan pemikirannya yang menekankan pencapaian atas kebaikan orang banyak sebagai tujuan utama dan cara yang ditempuh hanya sebagai instrumen. Oleh sebab itu, kebaikan orang banyak merupakan tujuan yang harus dicapai kendatipun harus mengorbankan kepentingan sekelompok kecil orang.

V. Andri Hananto, "Utilitarianisme dan Keseimbangan antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32:1 (Januari 2025), hlm. 73-74.

<sup>21</sup> Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi, dan Demokrasi, op. cit.*, hlm. 35-36

kesadaran moral yang sesungguhnya. Di mana, nilai-nilai moral telah menyatu seutuhnya dalam diri seorang individu. Ia menyadari kebaikan dari nilai-nilai moral yang ia anut.<sup>22</sup> Kesadaran akan pentingnya moral otonom membantu seorang individu untuk menjalankan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial secara bebas dan bertanggungjawab sepenuhnya pada dirinya dan anggota masyarakat lainnya. Pada titik ini seorang individu memandang norma agama dan hukum negara sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai kompas moral yang mengarahkan hidup setiap individu ke arah yang lebih baik.<sup>23</sup>

Permasalahan antar kelompok agama selama ini pada umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memahami ajaran agama dan hukum negara. Penafsiran atas isi kitab suci agama tertentu, kerap kali diselundupi oleh kepentingan dan tujuan kelompok tertentu. Berhadapan dengan situasi demikian, peran pendidikan dalam upaya membangun sikap kritis sangat diperlukan. Oleh sebab itu, peran pendidikan dan pembangunan manusia akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikut

### **Realitas Pendidikan di Indonesia Dewasa Ini (Jean Francois Lyotard)**

Ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek yang melekat di dalam kehidupan manusia (pendidikan merupakan salah satu bagian dari HAM). Ilmu pengetahuan merupakan salah satu upaya pemenuhan diri manusia itu sendiri. Ilmu pengetahuan merupakan pahlawan yang membawa kebebasan bagi manusia dan hak atas ilmu pengetahuan harus diperjuangkan.<sup>24</sup>

Pengetahuan harus dibuka dan terbuka bagi siapa pun. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia pengetahuan menjadi permasalahan yang terjadi terus menerus. Hal ini dapat terlihat dari indeks pendidikan di Indonesia yang menempati tempat keenam dari sepuluh negara ASEAN.<sup>25</sup> Rendahnya indeks pendidikan manusia di Indonesia menjadi permasalahan yang tidak dapat dianggap sebelah mata, karena hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia rentan terhadap eksploitasi pihak asing atau pun pemerintah Indonesia itu sendiri.

Rendahnya indeks pendidikan di Indonesia tidak hanya menghalangi manusia dalam upaya meningkatkan kehidupannya. Akan tetapi, ketimpangan pendidikan dan ilmu pengetahuan telah menciptakan konflik berkepanjangan akibat adanya celah antara kelompok-kelompok sosial. Perubahan sosial yang terjadi begitu cepat tidak terlepas dari kemajuan pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi telah membantu manusia menciptakan alat-alat yang memudahkan kehidupan manusia dan tidak jarang menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Teknologi secara tidak langsung telah menciptakan lingkungan hidup yang baru bagi manusia dan memaksa manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru tersebut. Siapa pun yang tidak mampu bersaing akan tersingkirkan.<sup>26</sup> Kelompok-kelompok yang termarginalisasi dari masyarakat pada umumnya, sangat rentan untuk dimanipulasi demi kepentingan tertentu yang kerap kali dibalut oleh kepentingan agama tertentu.

---

<sup>22</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar, op.cit.*, hlm. 44-46.

<sup>23</sup> Emanuel Kant dalam salah satu tulisannya mencoba untuk menjembatani nilai-nilai moral dan agama. Kant menegaskan bahwa ajaran kasih dalam agama harus dipandang sebagai kehendak secara sadar yang bersumber pada panggilan hati dan bukan sebagai perintah dari atas (Tuhan) semata. Oleh sebab itu, kepatuhan pada hukum (agama dan negara) tidak dibayangi oleh rasa takut pada hukuman semata, tetapi pada kesadaran sebagai seorang individu yang berakal budi dan bermartabat.

Franz Magnis-Suseno, *13 Model Pendekatan Etika* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 143-146.

<sup>24</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, terj. Geof Bennington dan Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984), hlm. 483.

<sup>25</sup> Scholastica Gerintya, "Indeks pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah", dalam [tirto.id](https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvr), <https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvr>, diakses pada 28 Januari 2026.

<sup>26</sup> Bernard Raho, SVD, *Sosiologi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2016), hlm. 324.

Pendidikan harus mengarahkan manusia pada pengembangan diri dan sumbangsih pendidikan pada masyarakat secara lokal dan nasional. Pendidikan saat ini di Indonesia, terjebak pada pandangan pragmatis semata.<sup>27</sup> Pendidikan harus didasarkan pada proses memanusiakan manusia dan bukan pada orientasi pasar kerja semata.<sup>28</sup> Oleh sebab itu, pendidikan dan para tenaga pendidik harus mengarahkan pendidikan pada pembentukan karakter manusia. Pendidikan harus dibingkai dalam pemahaman akan lingkungan di mana manusia berada.<sup>29</sup> Dengan demikian, manusia dapat mengambil jarak sejenak dan menilai lingkungannya secara objektif dan sejauh mana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk mencapai pemenuhan kehidupan manusia.

## **KESIMPULAN**

Agama dan negara merupakan dua hal yang berbeda tetapi memiliki hubungan yang sangat dekat. Agama dan negara memiliki tugas yang sama yaitu, melindungi dan memberikan rasa aman kepada warga negara dan para penganut agama tertentu. Rasa aman yang menjadi impian negara dan agama tidak dapat tercapai apabila negara dan agama tidak melupakan hal dasar dari negara dan agama, hal dasar tersebut adalah nilai. Negara menciptakan keamanan dengan menanamkan nilai melalui hukum dan agama menanamkan nilai melalui ajaran-ajaran moral.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ceunfin, Frans, (ed). Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik. 2 Jil. Terj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.
- Diamond, Jared. The World Until Yesterday (Dunia Hingga kemarin). Terj. Damaring Tyas Wulandari Palar. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Liotard, Jean-Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Terj. Geof Bennington dan Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.
- Madung, Otto Gusti. Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- . Post-Sekularisme, Toleransi, dan Demokrasi. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Poespwardojo, Soerjanto. Strategi Kebudayaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Raho, Bernard. Sosiologi. Cet. ke- 4. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Raz, Yoseph. “Hakikat Hak-Hak”. dalam Frans Ceunfin (ed). Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik. 2 Jil. Terj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.
- Suseno, Franz Magnis. Etika Dasar . Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.
- . Etika Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- . 13 Model Pendekatan Etika. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.

### **Jurnal**

- Hananto, V. Andri. “Utilitarianisme dan Keseimbangan antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 32:1, 2025, hlm. 72-98.
- Mirsel, Robertus et al. “Peranan Modal Sosial dalam Pencegahan dan Penanganan Masalah Intoleransi di Nusa Tenggara Timur”, Jurnal Ledalero, 22:1, 2023, hlm. 55-71.
- Syntia, Rika et al. “Pendidikan Sosiologi dari Sudut Pandang Agama” Journal Islamic Education, 1:4, 2023, hlm. 459-463.
- Topan, Mohammad. “Pragmatisme dalam Pendidikan di Indonesia: Kritik dan Relevansinya”, Jurnal Al-Idrak 1:1, 2021, hlm. 16-26.

### **Internet**

- Gerintya, Scholastica. “Indeks pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah”, dalam

---

<sup>27</sup> Mohammad Topan, “Pragmatisme dalam Pendidikan di Indonesia: Kritik dan Relevansinya”, *Jurnal Al-Idrak* 1:1, (2021), hlm. 18-19.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

tirto.id, <https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR>, diakses pada 28 Januari 2026.  
KBBI Online. “Pengertian Agama” dalam KBBI Online, <https://kbbi.web.id/agama>, diakses pada 28 Januari 2026.